

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM DI KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG

Syam Rahman Triyana¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Zaenal Abidin AS³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Penelitian berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya proses *collaborative governance* dalam pengelolaan aliran sungai citarum. Fenomena masalah, menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan aliran sungai citarum. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci sebagai data primer yang berjumlah 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum belum optimal, dapat dilihat dari (1) struktur jaringan yang sudah terbentuk sudah ditentukan dalam Perpres nomor 15 Tahun 2018 (2) *stakeholders* yang terlibat memiliki komitmen yang kuat serta tanggung jawab yang tinggi (3) *stakeholders* tercipta rasa saling percaya, namun kepercayaan masyarakat menurun seiring waktu (4) *stakeholders* sudah menjalankan MOU nya dengan baik, namun masih ada yang melanggar kode etik (5) pihak yang terlibat memiliki SOP yang jelas dan mengikat, tapi ada pihak yang belum bertanggung jawab dalam wewenangnya (6) proses pengambilan keputusan hanya dilakukan pihak pemerintah saja, tanpa melibatkan pihak swasta dan masyarakat. (7) akses informasi berjalan lancar, tetapi terkendala dalam keterbatasan masyarakat (8) aspek sumber daya, hanya memadai di kalangan pemerintah, tetapi di pihak masyarakat masih melakukan aksi gotong royong.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Pengelolaan, Daerah Aliran Sungai.

Abstract

The research entitled “*Collaborative Governance "In the Management of the Citarum River Watershed in Dayeuhkolot District, Bandung Regency."* The problem in this research is that the process is not yet optimal collaborative governance in Citarum River flow management. Problem phenomena, analyzing how processes collaborative governance in Citarum River flow management. Researchers used descriptive research methods with a qualitative approach. Data was obtained from observations and interviews with key informants as primary data, totaling 6 people. The research results show that Collaborative Governance Management of the Citarum River Basin is not yet optimal, it can be seen from (1) the network structure that has been formed has been determined in Presidential Decree number 15 of 2018 (2) *stakeholders* those involved have strong commitment and high responsibility (3) *stakeholders* mutual trust is created, but public trust decreases over time (4) *stakeholders* have implemented the MOU well, but there are still those who violate the code of ethics (5) the parties involved

have clear and binding SOPs, but there are parties who are not yet responsible within their authority (6) the decision-making process is only carried out by the government, without involving private and public parties. (7) access to information runs smoothly, but is hampered by community limitations (8) the resource aspect is only adequate in government circles, but on the part of the community they are still carrying out mutual cooperation.

Keywords : Collaborative Governance, Management, Watersheds.

PENDAHULUAN

Sungai citarum berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat pencemaran yang terjadi dan membuat kebersihan dari Sungai Citarum tidak terjaga. Selain itu, pembuangan tidak hanya dari sampah melainkan juga dari kotoran manusia yang berjumlah 36 ton dan kotoran lain yang berjumlah 56 ton yang berasal dari sektor peternakan yang dibuang ke Sungai Citarum (Prayoga, 2022). Dengan demikian, Sungai Citarum yang tidak hanya dicemari oleh sampah melainkan juga kotoran-kotoran yang membuat kondisi kualitas air di Sungai Citarum menjadi tidak layak untuk digunakan. Selain itu, pembuangan sampah juga dapat mengakibatkan banjir akibat menumpuknya jumlah sampah di sepanjang aliran sungai.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam mengelola Sungai Citarum mengeluarkan program pada bulan Februari tahun 2018 yaitu program “Citarum Harum”. Program Citarum Harum dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo pada tanggal 14 Maret 2018. Pelaksana dari program ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Satuan Tugas (Satgas) yang dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat. Tugas utama dari Tim Satgas ini adalah untuk mempercepat pemulihan Sungai Citarum dari pencemaran dan kerusakan sungai. Dalam Pelaksanaannya diharapkan Sungai Citarum dapat terbebas dari banjir dan dapat meningkatkan kualitas air Sungai Citarum menjadi sungai Kelas II yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2025. Pada program Citarum Harum, penanganannya dibagi dalam tiga tahap yaitu hulu, tengah, dan hilir. Pelaksanaan dari program ini dijalankan dengan pengintegrasian Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan

kementrian-kementrian terkait, termasuk di dalamnya Kodam III Siliwangi dan Polda Jawa Barat.

Dengan mengidentifikasi Dayeuhkolot sebagai wilayah yang mengalami masalah lingkungan yang sangat besar di Sektor 7, Program Citarum Harum bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dalam proses kolaborasi ini dengan berbagai upaya rehabilitasi dan konservasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pencemaran air dan banjir di wilayah Dayeuhkolot, serta meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, fokus pada Dayeuhkolot sebagai wilayah yang memiliki masalah lingkungan yang paling besar di Sektor 7 menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan Program Citarum Harum secara keseluruhan.

Diperlukan kerjasama antar *stakeholders* dalam upaya pengelolaan daerah aliran sungai, salah satunya melalui *collaborative governance* yang dianggap dapat memecahkan permasalahan yang melibatkan *stakeholders* dalam upaya pengelolaan daerah aliran sungai. Dalam menggunakan konsep *collaborative governance* ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah pemerintahan sekaligus untuk mendapatkan alternatif guna menyelesaikan permasalahan di pemerintahan. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan *collaborative governance* masih terdapat kendala permasalahan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah wawancara, foto, dokumen, rekaman dan alat bantu atau perangkat peneliti untuk mengumpulkan data. Unit analisis dalam penelitian meliputi pendamping DLH Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot, BBWS Citarum, Satgas Sektor 7, Pengelola Pabrik Dayeuhkolot serta Masyarakat Dayeuhkolot. Teknik pengumpulan data bagi peneliti ialah studi pustaka berupa referensi teori buku, jurnal, skripsi. Sedangkan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang

digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan mengambil keputusan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Proses *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan saat ini. Tentu terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi ini. *Collaborative Governance* itu sendiri tidak muncul secara tiba-tiba melainkan inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong agar terlaksananya kerjasama dalam menyelesaikan masalah publik. Munculnya *Collaborative Governance* ini dapat dilihat dari kondisi Sungai Citarum yang memunculkan berbagai masalah yang dapat merugikan masyarakat di sekitar Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung sehingga pemerintah tidak dapat menanganinya sendiri dan membutuhkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berada di Sungai Citarum tepatnya di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Dalam penanggulangan pencemaran dan pengelolaan air sungai tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah yang berupaya melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian serta pemeliharaan lingkungan Daerah Aliran Sungai. Dibutuhkan banyak aktor yang terlibat agar proses Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu bagian pengelolaan kualitas air, mencakup pencegahan dan pemulihan kualitas air sungai agar sesuai dengan baku mutu. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum dan pengawasan di daerah hilir sungai.

Adapun *stakeholders* yang bekerjasama dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Industri yang berada di kawasan Dayeuhkolot, serta masyarakat Dayeuhkolot sendiri. Masing-masing *stakeholders* memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengelola daerah aliran sungai Citarum menjadi lebih baik lagi sehingga dapat digunakan kembali manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan terhindar dari ancaman bencana di masa depan.

Collaborative Governance adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penyelesaian masalah. Selain itu *Collaborative Governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum untuk membuat suatu keputusan bersama yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Menurut De Seve untuk mengukur tingkat keberhasilan *Collaborative Governance* dapat dilihat dari 8 (delapan) aspek, yaitu:

- a. *Network Structure* (struktur jaringan) : Menurut Perpres No.15 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum memerintahkan Gubernur Jawa Barat untuk memimpin dalam proses pengelolaannya. Maka dari itu Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas membentuk Pokja (Program Kerja) yang melibatkan beberapa instansi pemerintahan untuk fokus dalam mengelola daerah aliran Sungai

Citarum dalam program Bernama Citarum Harum. Pihak pemerintah pun mengajak langsung pihak swasta serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum ini.

- b. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan) :
Setiap *stakeholders* yang terlibat memiliki komitmen yang kuat serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengelola daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk kembali bersih, sehat, dan dapat digunakan kembali secara langsung tanpa proses penyulingan apapun.
- c. *Trust among the participants* (adanya saling percaya antar aktor) :
Di antara *stakeholders* tercipta rasa saling percaya. Namun kurangnya konsistensi komunikasi yang terjadi, membuat rasa saling percaya tersebut tidak dirasakan oleh seluruh *stakeholders*. Komunikasi secara rutin hanya dilakukan oleh *stakeholders* dari pihak pemerintah yang terikat dan memiliki wewenang. Sementara rasa kepercayaan dari masyarakat seiring waktu turun, dikarenakan ada kinerja dari pemerintah yang melemah seiring waktu. Padahal masyarakat mempercayakan kinerja pemerintah dapat selalu maksimal dari awal program berjalan sampai berakhirnya program.
- d. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola) : Setiap *stakeholders* yang terlibat sudah menjalankan MOU nya dengan baik. Namun masih ada beberapa oknum dari pemerintah yang sering melanggar kode etik yang sudah tertulis sehingga merusak nama baik instansi di

mata masyarakat yang sudah mempercayakan penuh. Sehingga masalah ini bisa menambah rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan dari awal.

- e. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) : Dikarenakan setiap *stakeholders* yang terlibat memiliki SOP yang jelas dan mengikat, karena semua sudah tertulis dalam program Citarum Harum, maka setiap *stakeholders* memiliki tujuan yang sama kuat untuk mengembalikan Sungai Citarum menjadi bersih dan sehat kembali. Tapi ada beberapa pihak yang belum bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan wewenangnya. Sehingga membuat pihak lain harus melaksanakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pihak tersebut.
- f. *Distributive accountability / responsibility* (pembagian akuntabilitas / responsibilitas) : Proses pengambilan keputusan hanya dilakukan antara pihak pemerintah saja tanpa adanya keterlibatan antara masyarakat dan pihak swasta. Berbanding terbalik dengan prinsip proses kolaborasi yang mengutamakan pengambilan keputusan untuk tujuan bersama, maka proses kolaborasi dapat dikatakan belum maksimal. Dengan tidak maksimalnya proses kolaborasi ini dikhawatirkan ada beberapa hal yang menjadi masalah di lapangan tidak tersampaikan dan didengar dengan baik oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam proses pengelolaan aliran sungai Citarum.

- g. *Information sharing* (berbagi informasi) : Antar *stakeholders* sudah terorganisir dan akses informasi publik dilakukan melalui *platform* digital seperti *website* atau media sosial. Namun hal itu hanya dilakukan antara pihak pemerintah dan swasta saja. Beberapa masyarakat di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung masih memiliki kendala dalam mengakses nya. Ini bisa menjadi kendala yang cukup serius bagi masyarakat, karena akses informasi menjadi sebuah utama bagi masyarakat untuk mengetahui keberlangsungan program tersebut.
- h. *Access to resource* (akses sumber daya): Dalam segi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang sudah memadai dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yaitu untuk saling melengkapi sumber daya untuk membantu proses pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dapat berjalan lancar, walau masih ada sedikit terkendala dalam proses pemberian bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya kendala ini membuat peran masyarakat dalam pengelolaan jadi lebih banyak, karena harus bergotong royong untuk mengelola pembersihan sungai.

KESIMPULAN

Persoalan di Sungai Citarum masih menjadi masalah publik, kualitas air Sungai Citarum masih menjadi sarang penyakit untuk masyarakat disekitarnya, serta permasalahan daerah aliran sungai yang belum baik dapat menjadi ancaman bencana banjir untuk masyarakat yang tinggal di dekat Sungai Citarum. Dalam penanggulangannya, berbagai upaya serta

program telah digulirkan pemerintah untuk menanganinya, namun hasil yang diinginkan masih jauh dari apa yang diharapkan Masyarakat.

Proses *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung lebih banyak melibatkan pihak antar pemerintah dan swasta dalam pengelolaannya baik pada saat rapat koordinasi maupun pada saat di lapangan. Pihak antar pemerintah dan swasta ini yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Sejauh ini, dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung masih terdapat beberapa kendala seperti melemahnya kinerja pemerintah seiring waktu, beberapa oknum yang mencoreng nama instansi dengan masih melanggar kode etik, proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat, kendala masyarakat dalam mengakses informasi, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang sering terlambat. Keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Padahal, masyarakat yang sepenuhnya merasakan serta berhadapan langsung dengan Sungai Citarum yang seharusnya memiliki kontribusi lebih untuk menjaga tempat tinggalnya sendiri namun kurang dilirik pemerintah, dikarenakan masyarakat yang tidak tergabung secara langsung kedalam Program Citarum Harum dianggap tidak mempunyai kewajiban dan aturan yang mengikat untuk turun langsung dalam mengelola daerah aliran Sungai Citarum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Deseve, Edward. 2007, *Creating public using managed networks*. Armonk, NY: M.E. Sharpe
- Azhar, A. W., & Nasrun, H. (2020). *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Bakornas. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Djajasudarma, F. (2006). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, E. (2007). *Kajian Model Daerah Aliran Sungai Terpadu*.

- Mustanir, A. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- O'Leary, R. (2010). *The future of public administration around the world*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Sanaghan, B. P., & Lohndorf, J. (2015). Collaborative Leadership: The New ‘ Leadership Stance. In Collaborative Leadership in Higher Education. Academic Impressions.
- Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Provinsi Jawa Barat. (2019). *Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum*. Bandung.